

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM DIMASA PANDEMI
COVID-19 OLEH DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PEKANBARU
TAHUN 2020**

Oleh: Sofia Dini

Email: diniisofia@gmail.com

Dosen Pembimbing: Adlin, S.Sos,M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Panam Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293-

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

The Covid-19 pandemic that is happening globally, of course, has an impact on various sectors, especially in the economic sector. The Pekanbaru City Government (Pemko) has determined that Pekanbaru is responding to the Covid-19 emergency. . This has an impact on micro, small and medium enterprises (MSMEs) which automatically lose their income due to the restrictions imposed. In Pekanbaru City, around 7,888 Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) experienced a decline in turnover during the Covid-19 pandemic. In conditions like this, MSME business actors must be able to follow what consumers want.

The purpose of the study was to determine the implementation of the UMKM Empowerment Program (BPUM) during the Covid-19 pandemic by the Pekanbaru City Cooperatives and UKM Office based on 4 indicators of policy implementation from George C. Edward III, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The research method used in this study is a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The problem studied in this study was the MSME Empowerment Program during the Covid-19 Pandemic in Pekanbaru City which was run by the Pekanbaru City Cooperatives and SMEs Office based on the Regulation of the Ministry of Cooperatives and SMEs.

The results of this study indicate that the implementation of the MSME empowerment program (BPUM) in Pekanbaru City during the Covid-19 pandemic still did not run according to its goal, namely equal distribution of assistance for all MSME actors. Judging from the Communication indicators, where the implementation has been communicative, from the Resources indicator, the readiness of the planned implementation funds in the APBN is appropriate. Meanwhile, from the Disposition indicator, the policies at the Pekanbaru City Cooperatives and SMEs Office in the context of implementing the program that was launched have not been able to touch the whole community. SMEs in Pekanbaru City because not all SMEs receive BPUM assistance. From the indicators of the bureaucratic structure, the implementation has been very good. Diskop conducts training in accordance with the requirements of good health protocols. The hope in the future is equal distribution of empowerment and assistance for MSME actors affected by the Covid-19 Pandemic.

Keywords : Empowerment, SMEs, Covid-19 Pandemic.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor terutama di sektor ekonomi. Dampak perekonomian ini tidak hanya di rasakan secara domestik, namun juga terjadi secara global. *International Monetary Fund* (IMF) yang memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh minus di angka 3%. Di Indonesia, hal ini tentunya juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pariwisata, sector perdagangan, industri termasuk Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia, berdasarkan data terbaru pertanggal 04 Mei 2020, sudah terdapat 11.192 kasus covid-19 di Indonesia. (covid19.go.id) Dampak dari covid-19 secara langsung sudah terlihat dari PHK besar – besaran di beberapa perusahaan, terjadi penutupan beberapa usaha yang berdampak kepada dirumahnya karyawan¹.

Dalam kondisi seperti ini para pelaku usaha UMKM harus bisa mengikuti apa yang di inginkan oleh konsumen. Perubahan perilaku konsumen di tengah pandemi Covid-19 harus bisa dipahami betul oleh para pelaku usaha UMKM. Menurut Schiffman dan Kanuk dalam Sumarwan dkk (2012:186) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. Terjadi perubahan perilaku konsumen dari yang awalnya melakukan transaksi secara langsung, kini para konsumen akan lebih

memilih cara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka.

Berangkat dari Undang – undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah , beberapa kota di Indonesia meresponnya dengan menerapkan regulasi turunan untuk mendukungnya lewat Peraturan Daerah. Pemerintah kota Pekanbaru memiliki peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Di Kota Pekanbaru, Sekitar 7.888 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami penurunan omzet selama pandemi Covid-19. " Bulan April kemarin kita mendata pelaku-pelaku UMKM yang terdampak Covid itu sebanyak 7.888. Terdampak maksudnya, dulu misalnya usahanya 100 keuntungannya, sekarang tinggal 50," kata Kepala Diskop UMKM Kota Pekanbaru, Dr Idrus SAg MAg. Kata dia, saat ini masyarakat lebih memilih membuat makanan sendiri di rumah. Hal itu cukup mempengaruhi pelaku usaha tersebut."Karena saat ini orang berhati-hati untuk berbelanja. Selain itu orang banyak membuat sendiri di rumah. Yang terdampak itu yang mikro," jelasnya. Ia menjelaskan, dari 14.120 UMKM, 80 persen adalah usaha mikro. Selebihnya usaha kecil dan usaha menengah. Untuk usaha mikro, diperkirakan lebih kurang sekitar 11 ribu. "Usaha mikro itu modalnya atau asetnya antara 0 sampai Rp50 juta. Kalau usaha kecil, dari Rp50 juta sampai 300 juta asetnya. Kalau menengah Rp500 juta sampai Rp1 miliar," jelas Idrus.²

¹ Wan Laura Hardilawati, and Universitas Muhammadiyah Riau, 'Jurnal Akuntansi & Ekonomika', Jurnal Akuntansi,10.1 (2020).

² Cakaplah. '7.888 UMKM Di Pekanbaru Terdampak Pandemi Covid-19 - Cakaplah - Berpikir Berbuat Bercakap'
<[https://www.cakaplah.com/berita/baca/57522/2020/08/12/7888-umkm-di-pekanbaru-terdampak-](https://www.cakaplah.com/berita/baca/57522/2020/08/12/7888-umkm-di-pekanbaru-terdampak)

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskop UMKM) Kota Pekanbaru mengimbau seluruh usaha kecil setempat memanfaatkan bantuan dana COVID-19 yang disediakan Provinsi Riau dengan mendaftar lewat aplikasi khusus. "Bagi UMKM bisa langsung mendaftar dengan mengisi data lewat aplikasi <https://mataumkm.riau.go.id>, dilakukan langsung oleh pelaku," kata Kepala Diskop UMKM Kota Pekanbaru Idrus S.Agdi Pekanbaru, Selasa. Dia mengatakan Diskop Kota Pekanbaru sudah bekerjasama dengan Diskop Provinsi Riau akan menyalurkan bantuan kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. "Tentunya yang berhak adalah UMKM yang belum pernah mendapat bantuan dan juga yang betul-betul terdampak COVID-19," katanya. Bantuannya berupa uang senilai Rp2,4 juta untuk satu UMKM, caranya masuk ke aplikasi yang disediakan lalu provinsi Riau bekerjasama dengan BPKP memverifikasi langsung. "Kita berharap pelaku UMKM yang betul-betul ada usahanya, kemudian nama dengan NIK nya itu harus sama. Ini nanti di verifikasi oleh provinsi bekerjasama dengan kota," katanya.

Bantuan UMKM menjadi salah satu cara untuk memperpanjang nafas usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Sektor ini memang menjadi salah satu usaha milik masyarakat yang banyak mengalami guncangan di tengah pandemi Covid-19. Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Bantuan sosial ini akan diberikan kepada sekitar 12,8 juta pelaku

pandemi-covid19#sthash.uJNw4tUf.SczEqD6q.dpbs> [accessed 26 November 2020].

usaha dengan nominal Rp 1,2 juta per usaha. Harapannya, bantuan ini dapat digunakan untuk menjalankan usaha, baik menambah modal atau untuk keperluan promosi dan pemasaran produk UMKM³.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru juga akan terapkan berbagai langkah. Satu di antaranya, yakni membuat spanduk bahwa pelaku usaha mikro yang bersangkutan telah menerapkan protokol kesehatan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kepercayaan pembeli kepada penjual. Ini merupakan salah satu rencana aksi Diskop dan UKM kedepannya dalam memulihkan ekonomi masyarakat ditengah pandemi Covid-19, terutama pelaku UMKM. Selain pemasangan spanduk, Diskop juga akan menggalakkan belanja di warung tetangga atau warung terdekat. Dan juga akan mempermudah perizinan usaha mikro kecil yang belum memiliki izin usaha yang merupakan salah satu syarat pemberian KUR, Diskop juga mengimbau dan mengharapkan pada setiap OPD untuk membeli pada pelaku usaha mikro di Pekanbaru. Dan meminta pada OPD untuk menyediakan tempat bagi pelaku usaha mikro untuk berjualan di halaman kantor masing-masing. Yang tak kalah pentingnya, Diskop akan memanfaatkan IT atau jual beli online, juga menghimbau pada seluruh pengurus koperasi di Kota Pekanbaru untuk melaksanakan RAT, serta menginstruksikan pengurus dan anggota

³ Katadata. 2021. *Bantuan UMKM: Syarat, Cara Daftar, Cek Penerima dan Pencairan BPUM*. 08 Agustus.

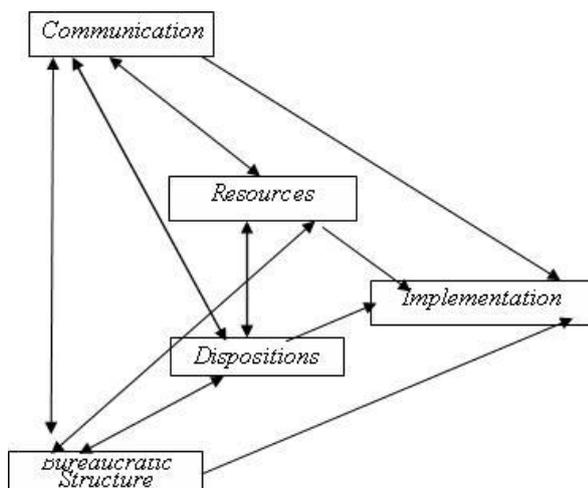
<https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/60e6dd521afe2/bantuan-umkm-syarat-cara-daftar-cek-penerima-dan-pencairan-bpum>

koperasi untuk berbelanja di koperasi masing-masing.

KERANGKA TEORI Implementasi Kebijakan

Teori Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III Model Edwards III (1980) mempertimbangkan empat faktor kritis atau variabel di dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu: faktor-faktor internal organisasi ini berpengaruh secara langsung terhadap implementasi, tetapi juga saling tergantung satu dengan yang lainnya. Edward menilai bahwa masalah utama administrasi publik rendahnya perhatian terhadap implementasi. Secara tegas dikatakan bahwa, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward III melihat empat isu pokok (faktor penentu) yang perlu mendapatkan perhatian agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yang digambarkan dalam kerangka model implementasi sebagai berikut:

Bagan 1. Model implementasi Edward III



Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energy adalah teori

yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. implementasi dapat dimulai melalui kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan public yaitu komunikasi (Communications), sumber daya (Resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).

Ke empat faktor diatas harus dilaksanakan secara simultan karena antar satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang kuat. Tujuan kita adalah meningkatkan pengetahuan tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan dengan cara diturunkan (membreakdown) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis yang dimana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor yang mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut:

- 1) Komunikasi, Faktor ini dalam Implementasi akan berjalan efektif dan efisien apabila ukuran dan tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan.
- 2) Sumber daya, Komponen sumber daya ini terdiri jumlah staf, keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, informasi yang jelas dan relevan agar cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang

menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

- 3) Sikap (Disposisi), faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi kebijakan ialah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan poin atau bagian isi dari kebijakan tersebut, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan dan bahkan akan menimbulkan banyak masalah.
- 4) Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi tidak dapat dilepaskan dari badan pelaksana suatu kebijakan, Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang badan-badan eksekutif mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka memiliki dalam menjalankan kebijakan.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif Menurut Whitney dalam Moh Nazir (2003 : 54), adalah metode penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan,serta proses-proses yang sedang berlangsung

dengan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena, metode penelitian deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, karena Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.

4. Jenis Data

Data primer dan Data Sekunder

5. Sumber Data

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti memilih siapa subjek yang berada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dan dipercaya untuk mewakili satu populasi tertentu.

6. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Program Pemberdayaan Pada masa Covid-19 oleh Dinas Koperasi dan UKM di Kota

Pekanbaru tidak selalu berjalan dengan lancar. Masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat proses implementasi kebijakan. Kendala tersebut merupakan kendala yang mendasar, diantaranya mengenai SDM, ketersediaan dana, dan proses komunikasi yang dilakukan oleh implementor kebijakan. Oleh sebab itu kendala-kendala tersebut di analisis penyebabnya berdasarkan teori model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Model implementasi kebijakan ini memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan yaitu isi dari kebijakan itu sendiri. Sebab kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila pelaksanaannya memahami isi yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan, dimana maksud dan tujuan itu dapat dilihat dalam isi kebijakan yang tertuang dalam pasal di dalam perda. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan serta tidak jelasnya sasaran kebijakan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dalam rangka upaya Pelaksanaan Program Pemberdayaan Pada masa Covid-19 oleh Dinas Koperasi dan UKM, maka dapat dikatakan bahwa sejauh ini Pemerintah Kota Pekanbaru telah berupaya untuk menangani permasalahan Pemberdayaan UMKM dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang sudah jelas. Komunikasi antar pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan

sasaran kebijakan merupakan tahap awal dalam setiap implementasi kebijakan. Dua hal yang perlu ditekankan dalam melakukan komunikasi menurut George C. Edwards III adalah konsistensi dalam penyampaian informasi dan kejelasan informasi yang disampaikan. Kegiatan pertama yang dilakukan dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Pada masa Covid-19 oleh Dinas Koperasi dan UKM yaitu komunikasi antara Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM.

2. Sumberdaya

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh berbagai sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sumber daya menjadi salah satu kunci kesuksesan proses implementasi kebijakan bagi suatu daerah. Sejatinnya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia seperti kompetensi implementor, sumber daya finansial atau bahkan peralatan, sarana/prasana dan lain-lain. Tanpa dukungan sumber daya, maka sebuah kebijakan hanya menjadi dokumen yang terpapar di atas kertas saja. Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh

positif dan berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien.

Dalam hal ini, sumber daya yang dilibatkan adalah sumber daya manusia. Didalam pelaksanaan Program BPUM dan Pelatihan Keterampilan ini, Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru melibatkan beberapa instansi yaitu Dinas Pariwisata, Dinas perindustrian dan Perdagangan juga BUMN.

3. Disposisi

Dalam konteks lahirnya suatu kebijakan publik bersumber dari adanya masalah di ruang publik yang membutuhkan proses penyelesaian masalah secara komprehensif. Lahirnya kebijakan tersebut dibebankan dengan adanya target yang ingin dicapai dalam penyelesaian masalah tersebut. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu Implementasi Kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Tipe manfaat sangat berkaitan erat dengan derajat perubahan yang diharapkan dari suatu kebijakan. Sebuah kebijakan yang terlalu menuntut adanya perubahan sikap dan perilaku yang signifikan akan lebih sulit untuk di implementasikan. Di samping itu kebijakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang juga akan menemui kesulitan dalam proses implementasi dibandingkan

dengan kebijakan yang secara nyata memberikan dampak keuntungan langsung terhadap kelompok sasaran.

4. Struktur birokrasi

Letak pengambilan keputusan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru sebagai salah satu *stakeholder* pengambil keputusan telah sesuai dengan tugas Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru yang tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja dinas-dinas dilingkungan pemerintah kota pekanbaru. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidangkoperasi, kecil, dan menengah;
- c. Membina dan melaksanakan urusan bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- e. Membina unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- f. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Stakeholder kedua dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan pemberdayaan UMKM di

Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru adalah kementerian Koperasi dan UKM, sebagai mitra Penanggung jawab program BPUM dalam membantu meningkatkan pengembangan UMKM. Konteks pengambilan keputusan tersebut menyangkut layak tidaknya sebuah UMKM mendapatkan Bantuan sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang ada di kementerian tersebut.

Steakholder ketiga dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan pemberdayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru adalah pihak perbankan sebagai mitra penyaluran BPUM.

KESIMPULAN

Berikut ini diuraikan kesimpulan mengenai pelaksanaan pemberdayaan UMKM (BPUM) pada Dinas Koperasi dan UKM di Kota Pekanbaru berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut ::

Pemberdayaan UMKM (BPUM) pada Dinas Koperasi dan UKM di Kota Pekanbaru tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berjalan optimal, dengan menggunakan teori Edward George C. Edward III terdapat 4 indikator yakni pelaksanaan pemberdayaan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM di Kota Pekanbaru tahun 2020 dilihat dari indikator Komunikasi yang mana pelaksanaannya sudah berjalan komunikatif dengan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh kementerian, Dari indikator Sumber Daya, kesiapan dana penyelenggaraan yang di rencanakan dalam APBN sudah sesuai dalam rangka terciptanya ekonomi UMKM bangkit Sedangkan dari indikator Disposisi,

kebijakan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru dalam konteks pelaksanaan program yang dicanangkan belum mampu menyentuh seluruh masyarakat pelaku UMKM di Kota Pekanbaru dikarenakan tidak semua UMKM menerima bantuan BPUM, penerima bantuan langsung dipilih oleh pusat. Jadi dampak yang ditimbulkan belum bisa dirasakan secara menyeluruh. Jika dilihat dari indikator struktur birokrasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan ini sudah sangat baik. Dinas Koperasi dan UKM kota Pekanbaru melaksanakan pelatihan sesuai dengan syarat protokol kesehatan yang baik. Namun untuk penerima program BPUM tetap pemerintah pusat (Kemenkeu) yang menentukan, Dinas Koperasi dan UKM kota pekanbaru hanya sebagai fasilitator saja.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan implementasi pemberdayaan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan UKM di Kota Pekanbaru, antara lain;

1. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru kedepannya harus membantu masyarakat pelaku UMKM memperoleh bantuan dari Pemerintah khususnya di masa pandemi ini.
2. Manfaat yang dihasilkan dari implementasi pemberdayaan UMKM hendaknya dirasakan lapisan masyarakat dilingkungan pelaku UMKM, juga mampu memberikan manfaat baru bagi UMKM yang belum mendapat program bantuan tersebut.

3. Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru agar memperluas sosialisasi UMKM dan mempermudah akses untuk mendapatkan bantuan BPUM bagi para pelaku UMKM.
4. Dalam pengambilan keputusan sebaiknya melibatkan komunitas, himpunan dan organisasi yang berbasis UMKM.
5. Agar mengupgrade program pendidikan dan pelatihan untuk parapelaksana program.
6. Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru agar menambah anggaran untuk operasional sebagai sumber daya finansial untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya
- 7.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adlin.2013. *Metode Penelitian Sosial*.Pekanbaru : Alaf Riau.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Alansori, Apip dan Listyaningsih, erna. 2020. *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*.Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Budiarto, Rachmawan.dkk. 2015. *Pengembangan UMKM antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*.Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Koesrianti.dkk. 2019.*Usaha Mikro Kecil dan Menengah*.Surabaya : Zifatama Jawara.
- Mardikanto dan Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: ALFABETA.
- Nazir, Moh.2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT.Ghalia Indonesia.
- Prastowo, Andi. 2014.*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Peneltian*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2014.
- Rahardjo, Tri Werda. 2018. *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Kemitraan Usaha UMKM, Koperasi dan Korporasi*. Surabaya : Jakad Publishing.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Vikaliana, Resista. 2021. *Pendampingan UMKM Masa Pandemi “ Institut Stami Berbagi Untuk UMKM ”*. Bandung : Media Sain Indonesia.
- Wijoyo, Hadion.dkk. 2021. *Strategi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi*. Sumatra Barat : Insan Cendekia Mandiri.
- Zulaikha. 2020. *Bisnis UMKM di Tengah Pandemi “ Kajian Komunikasi Pemasaran ”*.Surabaya : Unitomo Press.

B. Jurnal dan Skripsi :

- Jurnal Eka, Wilda Karunia. 2019. Implementasi Program Pemberdayaan Usaha MikroKecil Menengah (Pada Dinas Koperasi

Usaha Mikro Dan Perdagangan). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 8 No. 2.

Jurnal Hardilawati, Wan Laura. 2020. Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. Jurnal Akuntansi & Ekonomika. Vol. 10 No. 1.

Jurnal Mariyati, dkk. 2019. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Di Kecamatan Tuminting Kota Manado. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 5 No 75.

Jurnal Shofiana, Amaliya. 2020. Implementasi Program Afiliasi Berbasis Virtual Team Dalam Umkm Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.

Jurnal Sofian, dkk. 2020. Sosialisasi Strategi Usaha Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Produktivitas Pasca Pandemi Virus Covid19. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 1 No. 3.

Skripsi Rahmawati. 2020. Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategis Kabupaten di Kabupaten Bone.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

D. Media Online :

Antarariau.UMKM Pekanbaru dimbau memanfaatkan bantuan COVID-19 Riau ini caranya.Riau.antaraneews.com. 18 Agustus 2020.(<https://riau.antaraneews.com/berita/176578/umkm-pekanbaru-dimbau-manfaatkan-bantuan-covid-19-riau-ini-caranya>). Diakses pada 14 Desember 2020.

Cakaplah.7.888 UMKM Di Pekanbaru Terdampak Pandemi Covid-19. Cakaplah.com. 12 Agustus 2020. (<https://www.cakaplah.com/berita/baca/57522/2020/08/12/7888-umkm-di-pekanbaru-terdampak-pandemi-covid19#sthash.FWtJ0Qm7.dpbs>). Diakses pada 26 November 2020.

Globalnews.Kemenkop UKM Siapkan 5 Langkah Kebijakan Atasi Masalah UMKM di Masa Pandemi.Globalnews.id. 19 Juni 2020.

(<http://globalnews.id/kemenkop-ukm-siapkan-5-langkah-kebijakan-atasi-masalah-umkm-di-masa-pandemi/>).

Diakses pada 26 November 2020.

Investor.BI: 72,6% UMKM Terdampak Pandemi Covid 19. Investor.id. 08 Oktober 2020.

(<https://investor.id/business/bi-726-umkm-terdampak-pandemi-covid-19>).

Diakses pada 26 November 2020.

Pikiranrakyat.UMKM Terdampak Covid-19, Pemerintah Riau Salurkan Rp25 Miliar Untuk Pulihkan Ekonomi. Pikiranrakyat.com.

(<https://www.pikiranrakyat.com/nasional/pr-01645011/umkm-terdampak-covid-19-pemerintah-riau-salurkan-rp25-miliar-untuk-pulihkan-ekonomi?page=2>).

Diakses pada 14 Desember 2020.

Riaupos. Pemerintah Harus Beri Solusi Untuk UMKM. Riaupos.co. 29 Maret 2020.

(<https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/29/03/2020/228125/pemerintah-harus-beri-solusi-untuk-umkm.html>).

Diakses Pada 26 November 2020.